

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan & mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju *good governance*, diawali dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Diktum ketiga tentang Penetapan Kinerja), setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang telah berjalan dan Penetapan Kinerja SKPD untuk tahun yang akan berjalan. Seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2012, maka dengan ini kami susun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 Kecamatan Purbalingga, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Purbalingga disusun dengan landasan :

- a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (diktum ketiga tentang Penetapan Kinerja);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010;
- f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP.

- g. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 01.A Tahun 2004 tentang Revisi Program-Program Pembangunan/Implementasi Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga;
- h. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2012.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Purbalingga tahun 2012 adalah :

1) Maksud :

Maksud penyusunan LAKIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 adalah untuk memberikan gambaran secara rinci cara pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Instansi yang telah ditetapkan.

2) Tujuan :

Tujuan penyusunan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 adalah :

- a) Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
- b) Menjadi wahana evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara periodik setiap tahun agar dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari waktu ke waktu serta mewujudkan tatapemerintahan yang baik (*good governance*).
- c) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- d) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- f) Menjadi masukan bagi peningkatan kinerja perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya.
- g) Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

D. Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga.

Kecamatan Purbalingga merupakan salah satu wilayah dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 11 kelurahan dan 2 desa yang meliputi 64 RW dan 227 RT, terletak di pusat Ibu Kota Kabupaten Purbalingga, gambaran umum Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut :

a) Batas Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Bojongsari
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Kemangkon
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bukateja
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Padamara

b) Jarak/ Orbitrase

Jarak Kecamatan Purbalingga dengan kota Kabupaten Purbalingga 0 km.

c) Luas wilayah Kecamatan Purbalingga : 1.473,334 ha, terdiri :

- ❖ Sawah : 730,892 ha
- ❖ Kering : 742,442 ha

d) Pembagian Wilayah Administrasi

Kec. Purbalingga terdiri dari 11 Kelurahan dan 2 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Bojong luas wilayah 146,040 ha
2. Desa Toyareja luas wilayah 175,360 ha
3. Kelurahan Kedungmenjangan luas wilayah 126,629 ha
4. Desa Jatisaba luas wilayah 205,561 ha
5. Kelurahan Bancar luas wilayah 109,430 ha
6. Kelurahan Purbalingga Wetan luas wilayah 83,695 ha
7. Kelurahan Penambongan luas wilayah 113,801 ha
8. Kelurahan Purbalingga Kidul luas wilayah 103,240 ha
9. Kelurahan Kandangampang luas wilayah 53,024 ha
10. Kelurahan Purbalingga Kulon luas wilayah 51,931 ha
11. Kelurahan Purbalingga Lor luas wilayah 71,810 ha
12. Kelurahan Kembaran Kulon luas wilayah 103,283 ha
13. Kelurahan Wirasana dengan luas wilayah 131,530 ha

e) Keadaan Penduduk

❖ Jumlah Penduduk

Penduduk seluruhnya 63.114 Jiwa, terdiri dari :

Laki-laki : 31.663 Jiwa

Perempuan : 31.481 Jiwa

Jumlah KK : 20.528 Rumah tangga

❖ Mata Pencaharian Penduduk

➤ PNS : 1.622 orang

➤ TNI : 728 orang

➤ POLRI : 147 orang

➤ Kary.Swasta : 10.587 orang

➤ Wiraswasta : 4.163 orang

➤ Petani : 844 orang

➤ Pedagang : 3.374 orang

- Transportasi : 111 orang
- Pensiunan : 1.336 orang
- Buruh : 4.978 orang
- Belum Bekerja : 16.927 orang
- Pekerjaan lain : 18.327 orang

f) Tupoksi Kecamatan Purbalingga.

Kecamatan Purbalingga mempunyai tugas pokok *melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Purbalingga mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintah daerah di kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
9. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
10. Pembinaan Ideologi negara dan kesatuan bangsa;

11. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
12. Penyusunan program pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
13. Pengkoordinasian operasionalisasi tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayahnya;
14. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

g) Struktur Organisasi Pemeritahan dan Keadaan Pegawai

1. Struktur Organisasi Pemerintahan

- Camat
- Sekretariat Kecamatan :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Kelompok Jabatan Fungsional

2. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Purbalingga sejumlah 17 orang, dengan komposisi pegawai sebagai berikut :

a. Pegawai Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-laki : 10 orang
2. Perempuan : 7 orang

- b. Pegawai Menurut Pendidikan :
 - 1. S I : 7 orang
 - 2. D III : 3 orang
 - 3. SLTA : 4 orang
 - 4. SLTP : 3 orang
- c. Pegawai Menurut Golongan/ Ruang :
 - 1. Golongan IV : 1 orang
 - 2. Golongan III : 8 orang
 - 3. Golongan II : 7 orang
 - 4. Golongan I : 1 orang
- d. Pegawai Menurut Status Kepegawaian :
 - 1. Pegawai Negeri Sipil : 17 orang

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan selama ini beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah :

- a. Bagaimana mencukupi kesejahteraan pegawai.
- b. Bagaimana meningkatkan mutu pelayanan masyarakat
- c. Bagaimana agar dapat terfasilitasinya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Bagaimana agar dapat terfasilitasinya kegiatan pembinaan seni budaya, pemuda dan keagamaan di wilayah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Gambaran Umum SKPD
 - E. Permasalahan Utama
 - F. Sistematika Penulisan
- BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**
 - A. Perencanaan Strategis (Renstra)
 - B. Penetapan Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
 - A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
 - B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - C. Akuntabilitas Keuangan/Aspek Keuangan
- BAB IV PENUTUP**
 - A. Tinjauan Umum Tingkat keberhasilan
 - B. Permasalahan yang dihadapi
 - C. Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

➤ **VISI :**

Sejalan dengan Pradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Kecamatan Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut dan mengacu Visi Kabupaten Purbalingga, maka dirumuskan Visi Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

**“ PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN
MANDIRI DI WILAYAH KECAMATAN PURBALINGGA “**

➤ **MISI :**

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, Kecamatan Purbalingga menerapkan misi :

1. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Membina dan memfasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Budaya, dan Keagamaan;

3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa/Kelurahan.

➤ **TUJUAN**

- Misi 1 (Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat), tujuan pelaksanaan misi ke 1 adalah :
 - Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kantor yang tertib menuju terwujudnya pelayanan yang prima.
- Misi 2 (Membina dan memfasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Budaya, dan Keagamaan), tujuan pelaksanaan misi ke 2 adalah :
 - a) Meningkatkan kualitas seni budaya.
 - b) Meningkatkan kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan;
 - c) Meringankan penderitaan keluarga miskin.
- Misi 3 (Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa/Kelurahan.) tujuan pelaksanaan misi ke 3 adalah :
 - a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b) Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa.

➤ **SASARAN**

1. Sasaran dari meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat adalah :
 - a. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran, guna mendukung Pelaksanaan Pelayanan Administrasi.
 - b. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Jajaran Instansi terkait.
 - c. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik di Kec. Purbalingga untuk mendukung Kinerja Pelayanan
 - d. Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga (Fasilitas Kegiatan, Sosial, Budaya, Keagamaan, olahraga, Adipura, dll)

2. Sasaran dari Membina dan memfasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Budaya, dan Keagamaan adalah :
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas seni budaya.
 - b. Terwujudnya peningkatan kehidupan dan kerukunan umat beragama
 - c. Terwujudnya pembagian Raskin sesuai sasaran yang ditentukan
 - d. Terwujudnya Peningkatan kondisi rumah tinggal keluarga miskin
3. Sasaran dari Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa/Kelurahan adalah :
 - a. Terwujudnya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta administrasi pemerintah Desa dan Kelurahan
 - b. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

➤ **PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. Program Penataan Administrasi kependudukan, meliputi kegiatan Pelaksanaan E- KTP (KTP Elektronik)
2. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 - b. Kegiatan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Program Pengembangan Wilayah, meliputi kegiatan Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan.

B. Penetapan Kinerja

Sejalan dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka SKPD Kecamatan Purbalingga juga diwajibkan membuat Rencana Strategis 2012 – 2015, yang tentunya hal tersebut juga diikuti dengan

Penetapan Kinerja tahun 2012 yang merupakan kontrak kinerja Kepala SKPD dengan Pimpinan Daerah.

Untuk memudahkan kita membaca Penetapan Kinerja Tahun 2012 SKPD Kecamatan Purbalingga, berikut kami sajikan Penetapan Kinerja tersebut dalam bentuk matrik sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran, guna mendukung Pelaksanaan Pelayanan Administrasi.	Tersedianya Bahan dan Jasa untuk Pegawai dan masyarakat Kantor Kec. Purbalingga	19 Orang	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Rp 51.546.000,00
	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	100%		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Jajaran Instansi terkait.	Keikutsertaan dalam Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Wilayah Kab. Purbalingga	19 Orang	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rp 4.500.000,00
	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait.	100%		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Gedung kantor, 10 Kendaraan Dinas, 14 Alat kantor	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 95.314.000,00
	Meningkatnya fungsi Sarana dan Prasarana kantor Kecamatan Purbalingga dalam Pelaksanaan Pelayanan	100%		

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan Pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana kantor.	1 unit komputer, 1 unit printer	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 4.500.000,00
	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Lancar	100%		
Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga (Fasilitasi Kegiatan, Sosial, Budaya, Keagamaan, olahraga, Adipura, dll)	Menunjang semua Kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga	13 Desa/Kelurahan	Program Pengembangan Wilayah, Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	Rp 31.660.000,00
	Meningkatnya Fungsi Kecamatan Purbalingga (Terfasilitasinya semua kegiatan di wilayah)	100%		
Terlayaninya kebutuhan KTP Elektronik untuk masyarakat Wajib KTP di Kecamatan Purbalingga	Terbitnya KTP Elektronik Penduduk, bagi Penduduk Wajib KTP di Kecamatan Purbalingga	45.303 orang	Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelaksanaan E-KTP	Rp 95.450.000,00
	Pelayanan Elektronik KTP berjalan lancar, serta seluruh penduduk wajib KTP terlayani.	100%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dalam pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator pada tiap kegiatan, dalam melaksanakan tugas sehari-hari pencapaian Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purbalingga tahun 2012 menggunakan interpretasi pencapaian kinerja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang digambarkan sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d 85 : Berhasil
- 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
- Dibawah 55 : Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh. Analisa pencapaian kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purbalingga dapat dilihat apakah visi dan misi yang ditetapkan serta kebijakan yang dituangkan dalam program maupun kegiatan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sejalan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2012 SKPD Kecamatan Purbalingga, maka berikut kami sajikan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Purbalingga yang merupakan cermin tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2012 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran, guna mendukung Pelaksanaan Pelayanan Administrasi.	Tersedianya Bahan dan Jasa untuk Pegawai dan masyarakat Kantor Kec. Purbalingga	19 Orang	19 Orang	100
	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	100%	100%	100
	Anggaran	Rp 51.546.000	Rp 50.407.867	97,79
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Jajaran Instansi terkait.	Keikutsertaan dalam Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar	19 Orang	19 Orang	100
	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi	100%	100%	100
	Anggaran	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik di Kec. Purbalingga untuk mendukung Kinerja Pelayanan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Gedung kantor, 10 Kendaraan Dinas, 14 Alat kantor	1 Gedung kantor, 10 Kendaraan Dinas, 14 Alat kantor	100
	Meningkatnya fungsi Sarana dan Prasarana kantor Kecamatan Purbalingga dalam Pelaksanaan	100%	100%	100
	Anggaran	Rp 95.314.000	Rp 95.147.600	99,83
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan Pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana kantor.	1 unit komputer, 1 unit printer	1 unit komputer, 1 unit printer	100
	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Lancar	100%	100%	100
	Anggaran	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100
Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga (Fasilitasi Kegiatan, Sosial, Budaya, Keagamaan, olahraga, Adipura, dll)	Menunjang semua Kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga)	13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	100
	Meningkatnya Fungsi Kecamatan Purbalingga (Terfasilitasinya semua kegiatan di wilayah)	100%	100%	100
	Anggaran	Rp 31.660.000	Rp 31.045.000	98,06
Terlayannya kebutuhan KTP Elektronik untuk masyarakat Wajib KTP di Kecamatan Purbalingga	Terbitnya KTP Elektronik Penduduk, bagi Penduduk Wajib KTP di Kecamatan Purbalingga	45.303 orang	45.303 orang	100
	Pelayanan Elektronik KTP berjalan lancar, serta seluruh penduduk wajib KTP terlayani.	100%	100%	100
	Anggaran	Rp 95.450.000	Rp 94.833.000	99,35
NILAI RATA RATA				99,17

Jumlah Anggaran Kegiatan tahun 2012	: Rp. 282.970.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2012	: Rp. 280.433.467,-
Nilai Capaian Sasaran tahun 2012	: 99 %

D. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan

Guna mendukung pencapaian kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purbalingga pada tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka anggaran biaya yang digunakan berupa **Belanja Tidak Langsung** dan **Belanja Langsung** yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012.

Belanja Tidak Langsung meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, yang seluruhnya terdiri atas kegiatan-kegiatan : Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, serta Penunjang Kegiatan Kecamatan.

Untuk memudahkan kita melihat Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga memenuhi standar yang diharapkan maka Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Belanja Pegawai Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA PEGAWAI	910.178.000	885.381.840	97,28
1	Gaji dan Tunjangan	836.978.000	815.031.840	97,38
	a. Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi	597.189.000	582.296.685	97,51
	b. Tunjanga Keluarga	71.251.000	68.814.388	96,58
	c. Tunjangan Jabatan	62.920.000	62.920.000	100,00
	d. Tunjangan Umum	26.755.000	25.860.000	96,65
	e. Tunjangan Beras	47.723.000	45.827.100	96,03
	f. Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	17.762.000	17.280.874	97,29
	g. Pembulatan Gaji	9.000	9.993	111,03
	h. Iuran Asuransi Kesehatan	13.369.000	12.022.800	89,93
2	Tambahan Penghasilan PNS	73.200.000	70.350.000	96,11
	a. Tamsil Berdasarkan Beban Kerja	56.400.000	53.550.000	94,95
	b. Tamsil Berdasarkan Kondisi Kerja	16.800.000	16.800.000	100,00
		910.178.000	885.381.840	97,28

Tabel 2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA PEGAWAI	8.120.000	7.900.000	97,29
1	Honorarium PNS	8.120.000	7.900.000	97,29
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000	580.000	100,00
	b. Honorarium Pengelola Keuangan Pada SKPD	7.540.000	7.320.000	97,08
	BELANJA BARANG DAN JASA	43.426.000	42.507.867	97,89
2	Belanja Pakai Habis	18.460.000	18.404.000	99,70
	a. Belanja ATK	8.500.000	8.498.550	99,98
	b. Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	4.500.000	4.499.000	99,98
	c. Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	1.000.000	999.000	99,90
	d. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000	1.997.450	99,87
	e. Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000	960.000	100,00
	f. Belanja Bendera dan Umbul2	1.500.000	1.450.000	96,67
3	Belanja Jasa Kantor	13.966.000	13.117.367	93,92
	a. Belanja Telepon	1.800.000	1.622.210	90,12
	b. Belanja Air	2.040.000	1.458.040	71,47
	c. Belanja Listrik	8.230.000	8.199.117	99,62
	d. Belanja Surat Kabar / Majalah	1.896.000	1.838.000	96,94
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000	5.991.500	99,86
	a. Belanja Cetak	2.000.000	1.992.500	99,63
	b. Belanja Penggandaan	4.000.000	3.999.000	99,98
5	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	4.995.000	99,90
	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	3.995.000	99,88
	b. Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	1.000.000	100,00
		51.546.000	50.407.867	97,79

Tabel 3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000	4.500.000	100,00
1	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000	4.500.000	100,00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000	4.500.000	100,00
		4.500.000	4.500.000	100,00

Tabel 4 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA BARANG DAN JASA	95.314.000	95.147.600	99,83
1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.400.000	55.240.600	99,71
	a. Belanja Jasa Service	5.000.000	4.985.500	99,71
	b. Belanja Penggantian Suku Cadang	8.550.000	8.542.000	99,91
	c. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas	39.950.000	39.939.700	99,97
	d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000	1.773.400	93,34
2	Belanja Pemeliharaan	39.914.000	39.907.000	99,98
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	35.344.000	35.337.000	99,980
	b. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.770.000	3.770.000	100,00
	c. Belanja Pemeliharaan Meubelair	800.000	800.000	100,00
		95.314.000	95.147.600	99,83

Tabel 5 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA MODAL	4.500.000	4.500.000	100,00
1	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000	4.500.000	100,00
	a. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	3.850.000	3.850.000	100,00
	b. Belanja Modal Pengadaan Printer	650.000	650.000	100,00
		4.500.000	4.500.000	100,00

Tabel 6 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA PEGAWAI	6.250.000	6.000.000	96,00
1	Honorarium PNS	6.250.000	6.000.000	96,00
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000	6.000.000	96,00
2	Uang Lembur	0	0	0
	a. Uang Lembur PNS	0	0	0
	BELANJA BARANG DAN JASA	25.410.000	25.045.000	98,56
3	Belanja Bahan / Material	16.680.000	16.380.000	98,20
	a. Belanja Bahan Percontohan	300.000	0	0
	b. Belanja Penghargaan	16.380.000	16.380.000	100,00
4	Belanja Jasa Kantor	2.070.000	2.020.000	97,58
	a. Belanja Jasa Pihak Ketiga	950.000	950.000	100,00
	b. Belanja Jasa Dokumentasi	470.000	470.000	100,00
	c. Belanja Jasa Dekorasi	650.000	600.000	92,31
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000	300.000	100,00
	a. Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000	300.000	100,00
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.860.000	1.860.000	100,00
	a. Belanja sewa sound system	1.100.000	1.100.000	100,00
	b. Belanja sewa panggung	760.000	760.000	100,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	4.485.000	99,67
	a. Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000	3.485.000	99,57
	b. Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000	1.000.000	100,00
		31.660.000	31.045.000	98,06

Tabel 7 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk Kegiatan Pelaksanaan E-KTP (KTP Elektronik)

No	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA PEGAWAI	80.188.000	79.571.000	99,23
1	Honorarium PNS	13.810.000	13.810.000	100,00
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.810.000	13.810.000	100,00
2	Honorarium Non PNS	12.600.000	12.600.000	100,00
	a. Upah Harian	12.600.000	12.600.000	100,00
3	Uang Lembur	53.778.000	53.161.000	98,85
	a. Uang Lembur PNS	42.409.000	42.400.000	99,98
	b. Uang Lembur Non PNS	11.369.000	10.761.000	94,65
	BELANJA BARANG DAN JASA	4.912.000	4.912.000	100,00
4	Belanja Pakai Habis	1.500.000	1.500.000	100,00
	a. Belanja ATK	1.500.000	1.500.000	100,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000	780.000	100,00
	a. Belanja Penggandaan	780.000	780.000	100,00
6	Belanja Makanan dan Minuman	2.632.000	2.632.000	100,00
	a. Belanja makanan dan minuman rapat	2.632.000	2.632.000	100,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
	a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	0	0
	BELANJA MODAL	10.350.000	10.350.000	100,00
8	Belanja Modal Perlengkapan Peralatan Kantor	3.650.000	3.650.000	100,00
	a. Belanja Modal AC/Kipas Angin	3.650.000	3.650.000	100,00
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.700.000	1.700.000	100,00
	a. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.700.000	1.700.000	100,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0
	a. Belanja Modal Pengadaan Telepon	0	0	0
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.000.000	5.000.000	100,00
	a. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	5.000.000	5.000.000	100,00
		95.450.000	94.833.000	99,35

BAB IV

PENUTUP

Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Purbalingga untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari pada Tap MPR RI no. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang accountable dapat segera terwujud.

A. Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan

Pada Bab terdahulu dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2012 dapat dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas keuangan pada table di atas, Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 untuk **Belanja Langsung** dari pagu sebesar Rp. 282.970.000,- dapat direalisasikan sebesar 280.433.467,- atau 99 %, sedangkan untuk **Belanja Tidak Langsung** (Gaji dan Tunjangan Pegawai) dari pagu Rp. 910.178.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 885.381.840,- atau 97,28 %

Disamping hal tersebut terdapat pula program-program Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat yang dapat difasilitasi oleh SKPD Kecamatan Purbalingga dan seluruhnya terealisasi 100%, yaitu :

1. ADD/Hibah LKMK
2. PSPR Gakin

3. PTAPD
4. Intensifikasi PBB
5. PNPM Mandiri dll.

Tetapi untuk kegiatan pelayanan IMB dalam hal ini pencapaian target pendapatan retribusi IMB belum terealisasi sama sekali, hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang melaksanakan pendaftaran IMB di Kecamatan Purbalingga, karena kebanyakan yang mengajukan IMB luasnya lebih dari 100 M², hal ini merupakan kewenangan KPPT Kab. Purbalingga, sedangkan Kecamatan menangani dengan luasan di bawah 100 M² yang mayoritas warga kurang mampu. Oleh karena itu dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kec. Purbalingga tahun 2012, pos pendapatan tersebut dihilangkan.

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada SKPD kecamatan Purbalingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purbalingga Tahun 2012 dapat dinyatakan **"sangat berhasil"**. Hasil ini dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tersebut berada pada rating 85 – 100 yaitu 99 yang didasarkan pada Interpretasi Pencapaian Kinerja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan dengan kegiatan dari tingkat pemerintahan di atasnya;
2. Sarana prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat di butuhkan;
3. Tidak seimbang nya perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi.

C. Strategi Pemecahan Masalah.

Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi maka strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
2. Mencari / menggunakan sarana prasarana alternatif, melakukan perawatan sarana prasarana secara rutin.
3. Memotivasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang ada untuk mau mengejar kemajuan ataupun perkembangan teknologi.

Purbalingga, 12 Januari 2013

CAMAT PURBALINGGA

ENDRO IRIANTO, S.Sos.

Pembina

NIP. 19620505 198007 1 001

